

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMISDI KOTA MATARAM**
(Studi Dinas Sosial Kota Mataram)

*IMPLEMENTATION ANALYSIS OF MANAGEMENT OF STREET CHILDREN,
HOMELES and BEGGARS in MATARAM CITY*
(Study of the Mataram City Social Service)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

FAUZIAH TRISNAWATI

NIM : 217110054

**PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MATARAM**

Oleh :

FAUZIAH TRISNAWATI

NIM: 217110054

Untuk memenuhi ujian sidang skripsi
Pada tanggal 5 Agustus 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II



M. Aprian Jailani S.AP, M.AP
NIDN. 0804049501

Mengetahui,

Program Ilmu Administrasi Publik

Ketua Program Studi



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MATARAM.
(STUDY KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM)**

Oleh:

FAUZIAH TRISNAWATI

NIM: 217110054

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertahankan didepan penguji skripsi pada tanggal 5 Agustus 2021

1. **Dr.H. Muhammad Ali, M.Si**

NIDN. 0806066801

PU(.....)

2. **M. Aprian Jailani S.AP, M.AP**

NIDN. 0804049501

PP(.....)

3. **Drs. Amil, M.M**

NIDN.0831126204

PN(.....)

Mengetahui,
Program Ilmu Administrasi Publik
Ketua Program Studi

Rahmad Hidavat, S.AP, M.AP

NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. AP. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah hasil yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) Baik di universitas, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari bimbingan.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali sangat jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam draft pustaka
4. Pernyataan ini saya membuat dengan sesungguhnya dan apabila ditemukan hari terdapat penyimpangan dan dengan ketidak benaran dalam pernyataan hari ini maka saya bersedia sanksi akademik, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi lainnya.

Mataram, 5 Agustus 2021


10000
METERAI
TEMPEL
938EDA.JX360186533
Fauziah Irisnawati



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Trisnawati
NIM : 217110054
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 19 - Januari - 2000
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085337274774 /fauziahtrisnawati59@gmail.com
Judul Penelitian : -

Analisis Implementasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 494

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Penulis



Fauziah Trisnawati
NIM. 217110054

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Trisnawati
NIM : 217110054
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 19 Januari 2000
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085337274771 /fauziahtrisnawati59@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Implementasi Penanggulangan Anak Jalanan Jelandangan dan Pengemis di Kota Mataram (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Penulis


Fauziah Trisnawati
NIM. 217110054

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram (Studi pada Dinas Sosial Kota Mataram. Tahun priode 2021-2022). Penulis membuat Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang tepatan,oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan .Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM dan Wakil Dekan 2 Amin Sales, S.Sos, M.Si.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak M. Taufik Rachman Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan Selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Muhammad Aprian Jailani, S.AP, M.AP Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Drs.Amil,M.M Selaku Dosen Penguji Skripsi
8. Yang saya cintai dan hormati, kedua orangtua saya sayangi sudah bersusah payah mendukung saya dan selalu memberi motivasi.
9. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini

Mataram,5 Agustus 2021

Fauziah Trisnawati

ABSTRAK

Analisis Implementasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram

Oleh:

**Fauziah Trisnawati¹, Dr.H Muhammad Ali M.Si², M.Aprian Jaliani S.AP,
M.AP³**

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis implementasi penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota mataram, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil analisis implementasi ini yaitu adanya sumber daya manusia, finansial serta waktu yang mendukung pengimplementasiannya. Adapun karakteristik kebijakan dan disposisi karakteristik yaitu organisasi masyarakat maupun swadaya masyarakat, adanya kerjasama antar organisasi yaitu mabes polri, dukcapil dan swadaya masyarakat. Pada segi lingkungan dan sosial masih kurang pengimplementasian karena kurangnya kesadaran masyarakat serta menimbulkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan yaitu sasaran kebijakan yang tidak tepat.

Kata Kunci : Analisis, Implementasi, Penanggulangan, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis.

ABSTRACT

Analysis of the implementation of handling street children, homeless and beggars in Mataram city

By:

Fauziah Trisnawati¹, Dr.H Muhammad Ali M.Si², M.Aprian Jaliani S.AP,

M.AP³

This study examined the implementation of street children, homeless persons, and beggars in Mataram by using descriptive qualitative research methodologies. The existence of human, financial, and time resources supporting its implementation are this implementation analysis's findings. There are also policy characteristics and characteristic dispositions, namely community organizations and non-governmental organizations, a collaboration between the National Police Headquarters, Dukcapil, and Non-Governmental Organizations. In terms of the environmental and social factors, implementation is still insufficient due to a lack of public knowledge, which generates roadblocks in policy implementation, such as unsuitable policy aims.

Keywords: Analysis, Implementation, Prevention, Street Children, Homeless, Beggars.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penulisan	6
1.4.Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kebijakan Publik	8
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2.2.2. Konsep Implementasi	14
2.2.3. Model Implementasi	16
2.2.4. Faktor yang mempengaruhi implementasi	24

2.2.5. Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Mataram	27
2.3. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Waktu dan Lokasi	30
3.3. Penentuan Informan dan Narasumber	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Teknik dan alat pengumpulan data	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
3.7. Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Objek Umum Penelitian	37
4.2. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis	45
4.2.1. Implementasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram	45
4.2.1.1. Sumber Daya	45
4.2.1.2. Karakteristik Agen Pelaksana	52
4.2.1.3. Komunikasi Antar Organisasi	55
4.2.1.4. Lingkungan, sosial dan politik	58
4.2.2. Kendala dalam pengimplementasian penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota mataram.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Populasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram dari tahun 2018-20195
2. Penelitian Terdahulu9
3. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan Jabatan Struktural dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan46
4. Pendanaan Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Tahun 2020-2021.....47.



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berfikir 29
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram 37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Peraturan Walikota No.3 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah No.5 tahun 2014 tentang Penanggulangan Anak
Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat khususnya di perkotaan adalah permasalahan anak jalanan, anak miskin, pengemis. Masalah sosial ini adalah akumulasi dari banyak masalah yang berbeda. Berawal dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan kerja, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dll, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan banyak anak berkeliaran tanpa bantuan, mengemis dan mengemis. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi pengemis, gelandangan atau anak jalanan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan harus mengemis. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin lebih cenderung menjadi anak jalanan, karena kemiskinan seringkali membuat mereka kurang terlindungi.

Pendidikan sangat penting, akan menjadi modal setiap orang dalam berbagai hal, terutama dalam hal mencari pekerjaan. Setiap bidang pekerjaan harus memiliki standar pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan minimal kelulusan. Rata-rata gelandangan dan pengemis tidak berpendidikan, bahkan ada yang tidak pernah sekolah tidak berpendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan para gelandangan dan pengemis membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dari orang yang sudah menikah. Pada akhirnya, itu juga akan mempengaruhi anak Anda. Karena tidak ada pekerjaan, penghasilan yang tidak mencukupi dan tidak ada jalan untuk menyekolahkan anaknya, pada kenyataannya banyak orang tua yang harus

membiarkan anaknya menjadi pengemis, yatim piatu, dan anak jalanan, kesempatan untuk membantu orang tua menafkahi keluarga.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “pemerintah dan masyarakat setempat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun menerima uang untuk pendidikan”. Ketentuan tegas kedua undang-undang tersebut memperjelas bahwa negara dalam hal ini adalah pemerintah yang berkewajiban mendanai dan menjamin pendidikan setiap generasi di negara tersebut.

Pasal 34(1) UUD 1945 bertujuan untuk menghidupi atau membesarkan anak-anak miskin dan terlantar. Namun, begitulah realitas sosial. Orang-orang miskin ini bertambah karena tidak ada rencana untuk memberdayakan dan mengurangi mereka. Gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan semakin meningkat di kota-kota besar. Terlepas dari apakah gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak jalanan tergolong miskin dan terlantar, mereka jelas merupakan indikator kemiskinan di suatu daerah. Diakui beberapa pemerintah kabupaten/kota telah mampu membersihkan wajah para gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di kotanya, namun jumlah kabupaten/kota masih sangat sedikit.

“Negara mengurus anak-anak miskin dan terlantar” dalam pasal 34 ayat 1, dapat memiliki arti yang berbeda. Itu benar-benar tergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya. Meningkatnya jumlah anak miskin dan terlantar dapat menunjukkan bahwa negara belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Namun, menurut Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, perbaikan terus-menerus

mereka juga masuk akal, karena status de facto mereka "dipertahankan" (membiarkan mereka berkembang).

Mataram merupakan salah satu kota yang tidak lepas dari permasalahan sosial di atas. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan kebijakan terkait permasalahan sosial tersebut, yaitu Peraturan Walikota Mataram tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, yang meliputi penerimaan anak jalanan dan tuna wisma. Orang-orang yang kembali, pengemis dan seniman jalanan. Pemukiman merupakan dasar dari kebijakan Walikota Mataram dan bertujuan untuk mengurangi penyebab dan akibat dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Mengingat anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen seringkali membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta ketentraman tempat-tempat umum, dan menjadikan mereka sasaran eksploitasi dan kekerasan, maka DPRD Kota Mataram memandang perlu untuk menerapkan secara komprehensif, komprehensif dan berkelanjutan. perlakuan. .

Adanya permasalahan sosial seperti pengemis, gelandangan dan anak jalanan merupakan kritik tidak langsung terhadap jaminan sosial pemerintah untuk semua dan pemberdayaan mereka yang membutuhkan. Pemandangan pengemis, gelandangan dan anak-anak berkeliaran di kota Mataram dapat dilihat di sudut-sudut pekarangan, terutama yang dulunya adalah pangkalan para pengemis

Berikut table Populasi Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram menurut hasil data dari Kantor Dinas Sosial Kota Mataram :

Tabel . 1 Populasi Anak Jalanan,Pengemis dan Gelandangan

NO	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Anak Jalanan	Gelandangan dan Pengemis	Anak Jalanan	Gelandangan dan Pengemis
1	AMPENAN	12	23	20	28
2	CAKRA	14	8	18	30
3	MATARAM	21	12	31	21
4	SANDUBAYA	20	15	28	30
5	SEKARBELA	25	9	35	29
6	SELAPARANG	13	11	23	32
JUMLAH		60	80	125	100
		140		225	

Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Kota Mataram

Seperti terlihat dari tabel di atas, pada tahun 2019, jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan meningkat menjadi 140, dan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 225. Ini adalah inti masalahnya karena banyak faktor. Pertama, menurut hasil penelitian Engkus yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung”, Pemerintah Kota Mataram masih kurang optimal dalam mengatasi permasalahan yang ada, dan terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Mereka tidak terlalu aktif dalam mendukung implementasi kebijakan mereka. Kedua, menurut hasil penelitian Arif Kurnia yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1”, masyarakat juga kurang aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. 5 Tahun 2014 Anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah belum berhasil mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam krisis ekonomi, menjadi pengemis adalah pilihan sebagian orang. Karena penghasilan dari mengemis cukup besar. Sebagian orang yang tersentuh hatinya bisa memberi sedikit rezeki kepada pengemis, gelandangan, dan anak gelandangan, bahkan ada yang menganggap pengemis, gelandangan, dan anak gelandangan sebagai masalah sosial. Pada dasarnya, beberapa pengemis, gelandangan, dan anak jalanan ini dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Tapi sampai sekarang profesi pengemis tidak bisa dilepaskan, buktinya kalau dipukuli, mereka hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Lain halnya dengan pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang berjiwa abnormal atau usia lanjut akan memperlakukan mereka secara berbeda.

Sesuai uraian di atas, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan di daerah Kota Mataram menganalisis pengimplementasian Penanggulangan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram)

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat ditarik dari uraian latar belakang sebagai berikut.

1. Bagaimana Penanggulangan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram) ?
2. Apa kendala dalam pengimplementasian Penanggulangan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Penanggulangan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram)
2. Meneliti dan menganalisis kendala dalam pengimplementasian Penanggulangan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Mataram (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Mataram)

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana penerapan sebuah kebijakan di tingkat daerah dapat berjalan dengan semestinya.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Budi Aspiani Tahun 2020 berjudul “Kota Palembang, 2013 No. 12, Peraturan Daerah tentang Penempatan Anak Jalanan”. pelaksanaan “, para gelandangan dan pengemis secara keseluruhan sangat ideal, yang terlihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Palembang sejak diundangkannya peraturan daerah tersebut.
2. Hasil kajian Engkus tahun 2017 bertajuk “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung” menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum ada hasil yang terbaik. Sehingga Dinsos nangkis kekurangan sumber daya dan masyarakat belum berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan ini.
3. Hasil Penelitian dari Arif Kurnia, 2017 yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 TAHUN 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis* bahwa Tujuan yang diharapkan oleh pemerintah belum tercapai karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

4. Menurut Siti Raudah, hasil penelitian tahun 2019 berjudul “Peraturan Daerah Nomor 17 Tentang Perlakuan terhadap Gelandangan dan Pengemis Tahun 2015” (GEPENG) (studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Amuntai Tengah). Hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa tidak ada tempat penampungan untuk anak jalanan dan tunawisma di tempat penampungan, meskipun hal ini untuk mengatasi masalah peningkatan gelandangan dan pengemis.

5. Menurut hasil pemeriksaan Syahira Layali yang berjudul Penerapan Perda No. Tangerang 5 Tahun 2012, mengenai sasaran pengemis gelandangan dan pengamen anak jalanan di Tangerang, sebagaimana situasi yang ada Beberapa penjelasan penting mengenai akar penyebab hambatan tentunya diperlukan untuk mengurangi hambatan internal dan eksternal pelaksana, serta berdampak baik bagi terwujudnya tujuan bersama ketertiban masyarakat dan ketertiban umum.

Untuk lebih jelas dapat dipetakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel .2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Budi Aspani , (2020)	<i>Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis</i>	Secara keseluruhan sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2	Engkus, (2017)	<i>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung</i>	Secara keseluruhan belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinsos nangkis sendiri masih terbilang kurang. Dan masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini,
3	Arif Kurnia , (2017)	<i>Implementasi Peraturan Daerah No. 5 TAHUN 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis</i>	Tujuan yang diharapkan oleh pemerintah belum tercapai karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
4	Siti Raudah, (2019)	<i>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) (Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)</i>	Masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat di-mana rumah singgah untuk penampungan anak jalanan dan gelandangan tidak dibangun padahal inilah upaya dalam menanggulangi masalah maraknya para Gelandangan dan Pengemis tersebut

	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
5	Syahira Layali , (2018)	<i>Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang</i>	Beberapa tindakan pencegahan dari penyebab hambatan. Tentunya diperlukan pembenahan untuk mengurangi hambatan yang ada dari dalam dan luar pelaksana, serta berdampak baik terhadap terwujudnya tujuan bersama, ketertiban masyarakat dan ketertiban masyarakat.

Sumber : Jurnal Nasional 2021

Dibandingkan dengan menulis penelitian, hal itu disertai dengan kesamaan isi peraturan pelaksanaan. Perbedaan terletak pada upaya menjelaskan subjek penyelidikan. Pada penelitian sebelumnya dianalisis aspek-aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan , dan peneliti menggunakan aspek implementasi kebijakan dengan melihat sejauh mana aspek implementasi mendukung keberhasilan kebijakan. Walikota kabupaten.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

A. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah kecerdasan; wewenang; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan prinsip yang merupakan garis besar dan dasar dari rencana pelaksanaan kerja, kepemimpinan, dan perilaku (pemerintah, organisasi, dll); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau niat, sebagai pedoman bagi manajemen untuk mencapai tujuannya; pedoman, penonton adalah orang banyak (umumnya); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dll.). Kata politik berasal dari bahasa latin politea yang berarti warga negara. Karena politik berkaitan dengan pemerintahan, maka lebih tepat menerjemahkannya sebagai politik daripada politik.

Agustino (2012: 8) mendefinisikan politik sebagai berikut: serangkaian kegiatan dengan maksud/tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh satu atau sekelompok aktor yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan. Konsep kebijakan berfokus pada pekerjaan yang sebenarnya dilakukan, bukan pekerjaan yang diusulkan atau direncanakan. Di sinilah politik berbeda dari keputusan untuk memilih di antara beberapa opsi.

Agustino (2012: 8) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Menurut pendapat mereka, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Sebuah keputusan permanen yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tindakan orang-orang yang membuat dan bersikeras pada keputusan tersebut.

Agustino (2012: 8) mengemukakan: “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Melalui definisi ini, kita dapat memahami perbedaan antara apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa yang seharusnya dilakukan. Lebih lanjut, Agustino (2012: 8) juga mencoba mendefinisikan kebijakan publik sebagai "serangkaian aktivitas yang kurang lebih saling berhubungan yang memiliki efek berbeda pada pengambilan keputusan pemangku kepentingan". Ross memberi kita penjelasan yang berguna bahwa kebijakan publik adalah bagian dari mosaik atau model kegiatan, bukan hanya kegiatan dalam model peraturan.

Carl Friedrich (2012: 7) juga memberikan definisi lain tentang kebijakan publik. Dia mengatakan bahwa politik adalah "tempat dengan hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (peluang). Kebijakan yang diusulkan membantu mengatasi masalah ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan." Sebagai kegiatan untuk tujuan politik, tambah Friedrich, politik berkaitan dengan realisasi tujuan atau sasaran tertentu. Meskipun maksud atau tujuan kegiatan pemerintah tidak selalu mudah dilihat, politik menyiratkan gagasan tentang perilaku yang disengaja. Bagian penting dari mendefinisikan kebijakan Namun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan, bukan rekomendasi apa yang dibuat untuk isu-isu tertentu dalam kegiatan tertentu. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh pejabat dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, ciri dari kebijakan publik adalah pengambilan keputusan politik dilakukan oleh apa yang disebut oleh David Easton (2012: 8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: tenaga administrasi", konsultan, raja, dll. Mereka diminta untuk membuat keputusan

bahwa mereka akan diterima di masa depan dan menahan sebagian besar anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Kesimpulan berikut dapat ditarik: Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.

1. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.2. Konsep Implementasi

2.2.2.1. Pengertian Implementasi

Secara umum, kata eksekusi dalam kamus bahasa Indonesia mengacu pada eksekusi atau penerapan. Penelitian implementasi adalah studi tentang penelitian kebijakan yang mengarah pada proses implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat rumit, sehingga seringkali diintervensi oleh berbagai kepentingan politik.

Implementasi kebijakan adalah tahap kunci dalam proses kebijakan publik. Sebuah rencana kebijakan harus dilaksanakan untuk memiliki dampak atau tujuan yang diharapkan. Untuk memahami implementasi kebijakan, literatur terbaik adalah memberikan diskusi teoritis atau konseptual. Untuk menggambarkan kompleksitas proses implementasi, lihat pernyataan pakar penelitian kebijakan Eugene Bardach dalam buku Agustino (2012: 138) bahwa cukup untuk mengembangkan keseluruhan rencana dan kebijakan yang terlihat bagus di atas kertas. . Lebih sulit lagi untuk mengungkapkannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang disukai oleh para pemimpin dan pemilih yang mendengarkan mereka.

Bahkan lebih sulit untuk menerapkannya dengan cara yang menarik bagi semua orang, termasuk mereka yang mereka anggap pelanggan.

Pada tataran lain, Daniel Mazmian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan dalam bukunya “Implementation and Public Policy” sebagai: “Implementasi keputusan politik dasar biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa: Perintah administratif penting atau keputusan atau keputusan institusional. Peradilan biasanya menentukan masalah yang akan dipecahkan, dengan jelas mendefinisikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun atau membakukan proses pelaksanaannya. Fan Mi Te and Van Horn (Agustino), 2012: 139 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan. Dari ketiga definisi di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, dan pada akhirnya memperoleh suatu hasil yang memenuhi tujuan atau sasaran kebijakan.

(Agustino, 2012: 139) Mereka mengatakan bahwa implementasi adalah proses dan hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur

atau dilihat dari proses pencapaian tujuan akhir (produk), yaitu apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Merrile Grindle, seperti terlihat pada gambar berikut: mengukur apakah implementasi berhasil, dan dapat dilihat dalam prosesnya, yaitu mempertanyakan apakah implementasi rencana memenuhi konten yang telah ditentukan, yang berarti memeriksa tindakan dari setiap Rencana proyek, dan kedua, memeriksa untuk melihat apakah tujuan dari rencana tersebut tercapai. Perlu dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini, seluruh proses kebijakan akan dipengaruhi oleh keberhasilan tujuan.

2.2.3. Model Implementasi Kebijakan

1. Model George Edwards III

George Edwards III (1980: 1) berpendapat bahwa “dalam metode implementasi kebijakan kami, kami mulai dari abstraksi dan bertanya: Apa prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses?” Untuk menjawab pertanyaan penting ini, Edwards III (1980: 10) mengajukan It juga mempertimbangkan empat faktor untuk melaksanakan kebijakan publik, yaitu: “komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokrasi”. rakyat. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi, artinya tanpa satu faktor, ketiga faktor lainnya akan terpengaruh, dan akan berdampak pada buruknya implementasi kebijakan publik.

2. Model Van Meter dan Horn

Model metode implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut A Model of the Policy Implementation (1975). Proses realisasi ini merupakan abstraksi atau manifestasi yang dilakukan melalui suatu strategi, yang pada dasarnya merupakan realisasi yang disengaja dari kinerja tinggi dalam pelaksanaan strategi yang terjadi dalam berbagai hubungan variabel. Model tersebut mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan linier dengan keputusan kebijakan, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model tersebut menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait. Variabel ini adalah:

1. Sasaran Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana/ disposisi
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan skala pelaksanaan kebijakan dan tingkat keberhasilan tujuan, yang konsisten dengan budaya sosial

yang ada di tingkat kebijakan. Jika tujuan skala dan politik terlalu ideal (Utopia), sulit untuk mencapainya (Agusino, 2006). Van Metro dan Van Horn (Sulaman, 1998), pada dasarnya, mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan mengukur implementasi pelaksanaan kebijakan untuk menentukan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. . Tujuan ini. Standar dan tujuan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari skala implementasi kebijakan dan tingkat keberhasilan tujuan, yang sejalan dengan budaya sosial yang ada di tingkat kebijakan. Jika skala dan tujuan politik terlalu ideal (utopia), maka akan sulit dicapai (Agusino, 2006). Van Metro dan Van Horn (Sulaman, 1998) pada dasarnya mengevaluasi dan mengukur tingkat pencapaian tujuan implementasi kebijakan untuk menentukan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. .

2. Sumber daya

Implementasi strategi tergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara luas. Orang adalah sumber daya terpenting yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pada setiap tahap implementasi, dan pekerjaan yang dibutuhkan sejalan dengan keputusan non-politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu juga merupakan faktor perhitungan penting bagi implementasi kebijakan. Seperti yang dikatakan Desix: "Studi Kota Baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal adalah alasan utama kegagalan rencana tersebut."

Van Mater dan Van Horn (mencatat: "Sumber daya kebijakan sama pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus digunakan untuk mempromosikan pengelolaan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup dana atau insentif lain yang dapat mendorong implementasi kebijakan. implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sedang berjalan. Kurangnya atau keterbatasan dana atau insentif lainnya merupakan faktor penting yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

3. "Karakteristik organisasi pelaksana

Fokus lembaga pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting, karena karakteristik dan penerapan yang benar dari agen implementasi akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi strategi terkait dengan konteks kebijakan, yang berlaku untuk berbagai kebijakan yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dalam kasus lain, diperlukan badan eksekutif yang persuasif dan demokratis. Selain itu, cakupan atau area menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lembaga pelaksana kebijakan

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Horn dan Van Mater, agar dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, individu (pelaksana) harus memahami apa yang

menjadi tujuan standar. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus mengkomunikasikan standar dan tujuan tersebut kepada pelaksana. Untuk memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan, perlu menjaga konsistensi dan kesatuan berbagai sumber informasi.

Jika aturan dan tujuan kebijakan tidak jelas, tidak konsisten dan terpadu, akan sulit untuk mencapai aturan dan tujuan kebijakan. Dengan kejelasan ini, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu dilakukan. Dalam organisasi publik seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan rumit. Dalam proses penyampaian berita dalam satu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain dan komunikator lainnya, sering terjadi distorsi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika sumber komunikasi yang berbeda memiliki interpretasi standar dan tujuan yang tidak konsisten, atau sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, akan lebih sulit bagi pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan secara konsisten.

Oleh karena itu, kemungkinan implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada komunikasi (akurasi dan konsistensi) yang akurat dan konsisten dengan para pengambil keputusan. Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang kuat untuk implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin sedikit kesalahan, dan sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Metel dan Van Horn, diterima atau ditolaknya masalah implementasi kebijakan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Situasi ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil dari memahami masalah dan perasaan tetangga. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top-down, dan pengambil keputusan mungkin tidak mengetahui atau bahkan tidak mampu memecahkan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang perlu ditangani.

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang politik dan pandangan mereka tentang pengaruh politik terhadap organisasi dan kepentingan pribadi mereka. Van Mater dan Van Horn menjelaskan kecenderungan implementasi kebijakan untuk menyaring terlebih dahulu melalui persepsi pelaksana terhadap derajat implementasi kebijakan. Ada tiga jenis elemen respons yang memengaruhi kemampuan dan kemauan Anda untuk menerapkan kebijakan: pertama, pengetahuan (kognisi), pemahaman dan pemahaman tentang kebijakan; kedua, arah respons Anda adalah penerimaan, netralitas, atau penolakan.) Ketiga, kekokohan kebijakan.

Penting untuk memahami tujuan keseluruhan dan tujuan kebijakan dari standar. Sebab, bagaimanapun juga, keberhasilan implementasi suatu kebijakan bisa saja gagal jika pelaksana (pejabat) tidak sepenuhnya memahami standar dan tujuan kebijakan. Arah penerapan standar dan tujuan kebijakan. Penerapan standar panduan dan tujuan kebijakan juga merupakan masalah "kritis". Pelaksana mungkin

tidak dapat mengimplementasikan kebijakan karena mereka menolak untuk menerima tujuan dari kebijakan tersebut.

Di sisi lain, penerimaan yang luas dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan oleh penanggung jawab implementasi kebijakan memiliki potensi besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman: 1974). Pada analisis akhir, kehendak pelaksana (implementer) akan mempengaruhi pelaksana (kinerja) kebijakan. Kurangnya ketentuan ini atau kekuasaan yang terbatas akan mengakibatkan kegagalan untuk mengimplementasikan kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi akar penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif. Secara skematis model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan pada gambar berikut:



3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) . Dalam Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni

1. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)
2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
3. Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan publik Edward III (1980-28) menyebutkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

- a. *Communicationtransmission, clarify and consistency* (terjadi proses komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten).
- b. *Resources: staff, infirmation, outhority,fasilities* (terdapat sumberdaya yang didukung oleh setaf, informasi, kewenangan maupun fasilitas yang memadai).
- c. *Disposition: Incentives,staffing* (terdapat pertunjukan yang jelas mengenai pemberian insentif dan dukungan staf).
- d. *Bureauceratic Structure; standard operating procedures, fragmentation* (terdapat sistem birokrasi yang memiliki prosedur standar kerja yang memadai).

Ke-empat implementasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Masing –masing faktor saling mempengaruhi faktor yang lain bebas terjadi interaksi antar

faktor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap faktor yang lain dan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

A. Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik

Semua kebijakan publik dirancang untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku manusia dalam beberapa cara untuk membujuk orang agar bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan paten dan hak reproduksi, perumahan terbuka, biaya harga, perampokan malam, produksi pertanian atau pendapatan militer. Jika kebijakan tidak dapat ditegakkan, jika orang terus berbuat salah, jika mereka tidak menggunakan metode yang ditentukan atau berhenti melakukan hal yang ditentukan, kebijakan tersebut dikatakan tidak valid atau hasilnya nol. Menurut Leo Agustino (2012:157), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan

a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah

Sifat manusia dikatakan memiliki keadaan alam yang positif, mengacu pada filosofi politik John Locke. Artinya manusia dapat menerima hubungan antar individu dengan sangat baik. Ketika hubungan ini berhasil, logika mendorong semua warga negara untuk saling menghormati, menghormati otoritas orang tua, menghormati pengetahuan ilmiah, menghormati hukum politik, dan mematuhi aturan pemerintah, artinya ada sistem sosial. .. Hukum. seperti mendirikan pemerintahan publik dan menjabat dengan percaya diri.

Kepatuhan ini berlanjut sampai individu dan warga negara masih percaya bahwa wajar dan masuk akal untuk menghormati masalah ini. Akibatnya, kami

percaya bahwa manusia menerima pendidikan moral dan terus mematuhi peraturan, ini bermanfaat bagi masyarakat, dan bahwa rasa hormat dan penghargaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah adalah kata kunci penting untuk ini. hadiah. Realisasi kebijakan publik. Ajakan pemerintah kepada warga negara untuk menghormati pemerintah saat ini atas legitimasinya secara otomatis dihormati melalui undang-undang, peraturan daerah yang diatur pemerintah, pemerintah atau nama/istilah lain.

b. Ada kesadaran akan penerimaan kebijakan.

Di era modern saat ini, di mana pilihan rasional mendorong masyarakat, orang sering menemukan bahwa individu / warga negara berpikir bahwa kebijakan publik itu logis, rasional, dan praktis diperlukan. Di sisi lain, banyak orang yang tidak suka membayar pajak, terutama karena lemahnya perekonomian saat ini. Tetapi mengingat bahwa pemerintah membutuhkan pajak untuk berkontribusi pada layanan publik, orang-orang menyadarinya dan tidak mudah untuk mematuhi. Bermain di ranah “hati nurani” berarti pemerintah perlu mengubah pola pikir warganya melalui perilaku dan sikap yang didasarkan pada pola pikir yang dibentuk oleh mesin itu sendiri.

c. Sanksi hukum

Orang dipaksa untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan karena takut akan hukuman seperti denda dan penjara. Oleh karena itu, salah satu strategi yang sering dilakukan oleh badan-badan administratif dan birokrasi untuk menjalankan kebijakan publik adalah dengan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap

setiap kebijakan yang mereka lakukan. Karena tidak ingin melanggar hukum, mereka terpaksa melaksanakan isi kebijakan publik.

d. Adanya Kepentingan Umum

Kebijakan publik adalah sah, konstitusional, dirumuskan oleh pejabat tokoh masyarakat dan dimungkinkan melalui proses hukum, yang diyakini masyarakat umum. Jika suatu kebijakan ditetapkan sesuai dengan ketentuan di atas, seringkali masyarakat tidak akan ragu untuk menerima kebijakan tersebut dan melaksanakannya. Apalagi ketika kebijakan publik berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

e. Adanya kepentingan pribadi

Karena orang, sendiri atau kelompok, akan mendapat manfaat langsung dari proyek implementasi kebijakan, mereka siap untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan.

f. Masalah Waktu

Mengingat publik memiliki kebijakan yang melanggar kepentingan publik, warga cenderung menolak kebijakan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan yang ditolak dan kontroversial akhirnya menjadi rasional dan dapat diterima.

2. Faktor tidak dilaksanakan suatu kebijakan

a. Isu kebijakan.

Implementasi kebijakan masih bisa gagal karena ketidakpastian internal dan eksternal, kurangnya tekad, atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan bahwa tidak ada sumber daya pendukung.

b. Informasi.

Informasi yang tidak memadai kemungkinan akan menghasilkan gambaran yang tidak akurat tentang konten kebijakan dan hasil kebijakan yang diterapkan baik oleh target kebijakan maupun pelaksana.

c. Persetujuan/ Dukungan

Dalam implementasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik sangat sulit tanpa dukungan yang memadai terhadap kebijakan tersebut.

2.2.5. Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram

A. Pengertian Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

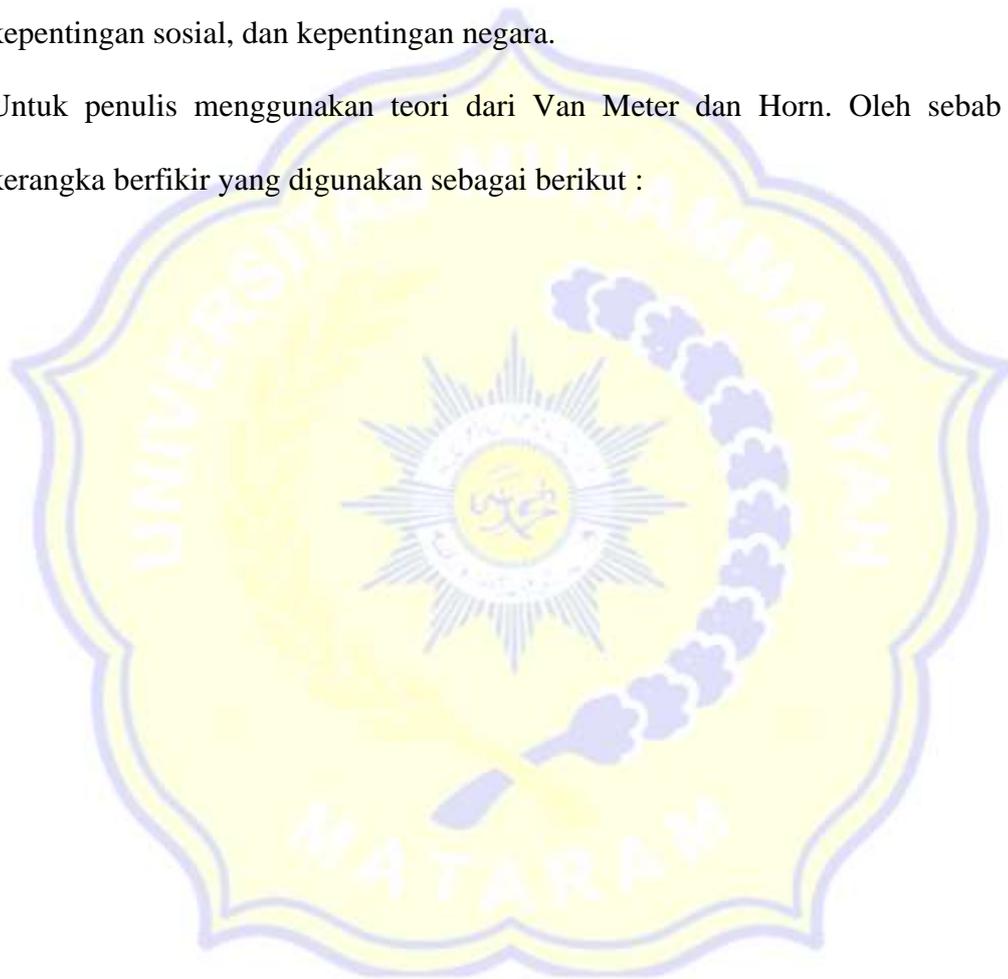
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

2.3 Kerangka Berfikir

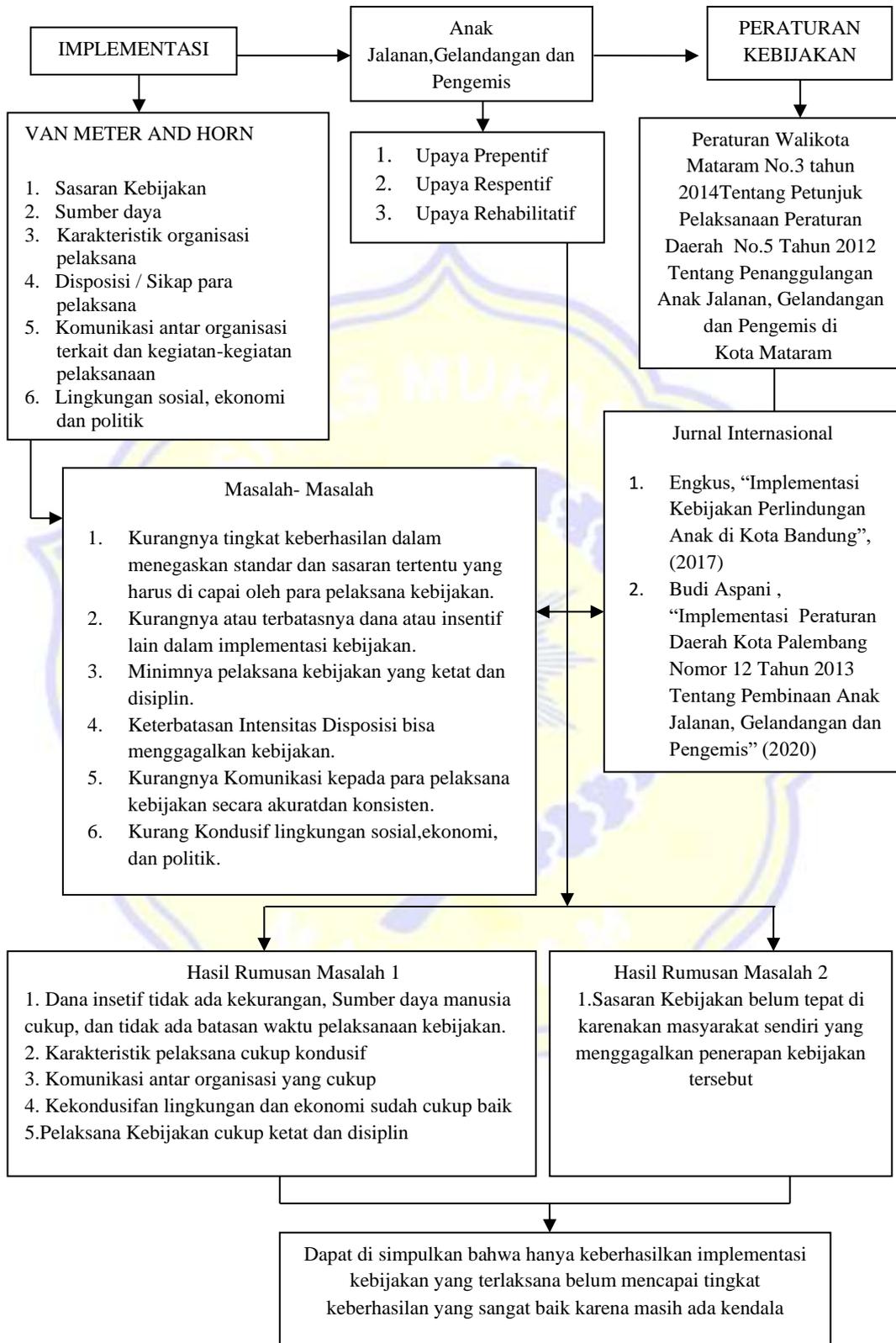
Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan pekerjaan sadar dan terencana yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan terciptanya

ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah kota dan instansi terkait harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan masyarakat lainnya, penghibur di jalan. Mengenai hasil pembangunan, diharapkan tercapai keseimbangan, keserasian, dan keserasian antara kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara.

Untuk penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Horn. Oleh sebab itu kerangka berfikir yang digunakan sebagai berikut :



Gambar.01 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa wawancara tertulis atau lisan dengan staf Dinas Sosial Kota Mataram dan individu tertentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori dan data yang ada, untuk diambil kesimpulan.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 13 Juni 2021-30 Juli 2021. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kota Mataram, tujuan penulis mengambil lokasi ini karena peneliti merasa mudah dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini.

3.3. Penentuan Informan/Narasumber

Informan dalam peneliti ini adalah orang yang dianggap paling tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber data yang akurat.

➤ Berdasarkan penjelasan di atas informan dalam peneliti ini adalah :

1. Pak Ridho selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Usia Lanjut
2. Ibu Hj Baiq Asnayati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Mataram
3. Masyarakat
4. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

3.4. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer ini berupa catatan wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan serta pengumpulan data berupa catatan situasi dan kejadian di lapangan. Selain itu digunakan data sekunder, yaitu data primer pelengkap atau pendukung yang digunakan dari data yang relevan. Data ini dapat berupa dokumen Peraturan walikota nomor 3 tahun 2014, Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram, Peraturan Walikota nomor 38 tahun 2016 tentang TUPOKSI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM, dan beberapa foto-foto dokumentasi hasil wawancara. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung ke lapangan.

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data tergantung dari jenis penelitiannya, adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan di lapangan meneliti kejadian secara langsung dan kemudian mencatatnya. perilaku dan peristiwa yang digambarkan terjadi dalam keadaan kehidupan nyata, kemudian diamati untuk memungkinkan peneliti merekam peristiwa dalam situasi yang melibatkan pengetahuan proposisional dan pengetahuan langsung yang diperoleh dari data.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui hal-hal dari orang-orang yang memberikan informasi lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak, dokumen Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2014, Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram, Peraturan Walikota nomor 38 tahun 2016 tentang TUPOKSI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

1. Reduksi data

Karena data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian cukup besar, diperlukan pencatatan yang cermat dan rinci. Meminimalkan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dalam minimisasi data, penelitian berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah hasil. Oleh karena itu, jika saat melakukan pencarian, Anda menemukan sesuatu yang dianggap outlier, tidak diketahui, dan tidak berpola, inilah yang harus diperhatikan oleh peneliti saat menyusutkan data.

2. Penyajian data

Dengan penyajian data, lebih mudah memahami apa yang terjadi, guna merencanakan tindak lanjut kerja atas apa yang telah dipahami.

3. Menarik kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, meneliti makna dan interpretasi, kemudian mengatur beberapa pola relasional menjadi satu kesatuan informasi yang mudah dipahami. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan sesuai dengan rincian masalah dan dibandingkan satu sama lain sehingga kesimpulan seperti jawaban dari setiap masalah dapat dengan mudah ditarik.

3.7. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksana teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

1. Derajat Kepercayaan

Fungsi ini dilaksanakan dengan cara untuk mendapatkan pencapaian kredibilitas hasil survey dan untuk mempelajari banyak fakta.

2. Keteralihan

Keteralihan sebagai masalah empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan transfer ini, peneliti mencari dan mengumpulkan peristiwa empiris yang terkait dengan kesamaan kontekstual. Oleh karena itu, jika penyidik ingin mengambil keputusan tentang pemindahan

tersebut, ia bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif yang cukup. Untuk tujuan ini, peneliti perlu melakukan penelitian untuk memastikan pekerjaan verifikasi.

3. Ketergantungan

Ketergantungan lebih luas daripada keandalan. Hal ini dikarenakan revisi konsep tersebut mempertimbangkan seluruh isi dari keandalan itu sendiri dan faktor-faktor lain yang terkait.

4. Kepastian

Objektivitas-subyektivitas hal-hal tergantung pada seseorang. Selanjutnya, konsep objektivitas memiliki faktor kualitas. Hal ini diambil dari pemahaman ini. Jika sesuatu adalah objek, itu berarti dapat diandalkan, benar, dan dapat ditentukan; subjektif berarti tidak dapat diandalkan atau menyesatkan. Pemahaman akhir inilah yang dijadikan dasar untuk mentransformasikan konsep objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.